

BAB III

Kontestasi Kelompok Masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Stadion Bukit Lengis Kabupaten Gresik

III.I Stadion Bukit Lengis



Gambar III.I Stadion Bukit Lengis

Perkembangan sebuah daerah dapat dilihat dari pertumbuhan serta pembangunan yang ada di daerah tersebut. Perbaikan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gresik ini bertujuan untuk

meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai serta dapat menampung kumpulan masyarakat, agar dapat bersosialisasi.

Dalam perkembangan di era globalisasi ini kabupaten Gresik berupaya untuk menciptakan Trade mark baru bagi wilayahnya, dimana dilakukannya Pembangunan Stadion Bukit Lengis, dimana stadion ini merupakan salah satu proyek mercusuar yang ada di kabupaten Gresik setelah adanya tugu selamat datang, WEP (Wahana Ekspresi Poesponegoro), BGS (Bendung Gerak Sembayat), Bandara perintis di pulau Bawean, dan masih banyak proyek-proyek lainnya.

Pembangunan Stadion Bukit Lengis ini direncanakan pada tahun 2012. Untuk pembangunan tahap pertama yang di mulai pada 2013, pemerintah kabupaten Gresik menyiapkan anggaran sebesar Rp. 230 miliar. Dimana tahap pertama mencakup 35 persen tribun yang akan berkapasitas 25.000 penonton yang diproyeksikan selesai pada juni 2015. Sementara pembangunan tahap kedua akan membutuhkan anggaran Rp. 40 miliar untuk membangun lima lantai hingga utuh mengelilingi Stadion dengan kapasitas total 48.000 yang nantinya stadion ini bertaraf Internasional.

Rancangan mendetail stadion bukit lengis mencakup penyediaan jalur khusus untuk mengantisipasi ledakan penonton. Dimana ada empat jalur utama yang nantinya terhubung dengan tribun dan area komersial. Ekosistem stadion bukit lengis yang nantinya diharapkan menjadi wadah baru bagi masyarakat kabupaten Gresik untuk berekspresi dan bersilaturahmi lewat komunitas-komunitas yang terus

bertambah. Stadion Bukit Lengis ini diharapkan menjadi kebanggaan masyarakat Gresik karena merupakan satu-satunya stadion dengan lokasi tertinggi di Indonesia.

Gresik yang merupakan salah satu wilayah penyangga Surabaya, merupakan salah satu pusat Industri yang ada di Jawa Timur. Dengan adanya perkembangan baik perekonomian yang selalu memiliki nilai pertumbuhan ekonomi melebihi tingkat Provinsi maupun Nasional, membuat Gresik ingin menjadi salah satu daerah yang memiliki fasilitas-fasilitas yang mumpuni untuk menjadi salah satu kawasan yang memiliki nilai historis. Banyak fasilitas-fasilitas mercusuar yang sudah dibangun maupun yang masih dalam proses pengerjaan. Dimana Gresik memiliki sebuah fasilitas mercusuar yang dalam tahap pembangunan yaitu Stadion Bukit Lengis.

Stadion Bukit Lengis yang merupakan salah satu proyek prestisius di Gresik ini dibangun di daerah Gunung lengis (desa segoromadu). Dimana letak Gunung lengis ini berdekatan langsung dengan kota Surabaya. Sehingga pembangunan stadion bisa dilihat langsung dari wilayah Surabaya yang berbatasan langsung dengan kabupaten Gresik. Melihat pembangunan Stadion Bukit Lengis yang sangat besar baik dari segi anggaran maupun pembangunan stadion yang akan direncanakan merupakan stadion Grade A. yang nantinya akan menjadi ajang internasional, baik dari acara olahraga maupun pariwisata. Selain itu pembangunan stadion diharapkan menjadi sebuah wadah masyarakat untuk menjadi salah satu rujukan warga untuk

bersosialisasi, membangun relasi dengan masyarakat gresik maupun luar Gresik. Serta menjadikan Gresik memiliki stadion sendiri yang dikelola Pemerintah daerah yang nantinya diperuntukkan untuk klub sepakbola kebanggaan masyarakat gresik, yaitu persegres (persatuan sepak bola Gresik).

Proses kebijakan public akan terdiri dari langkah-langkah: Identifikasi masalah, formulasi kebijakan, legitimasi, implementasi, dan evaluasi melalui berbagai sumber untuk melihat sejauh mana usaha untuk pencapaian tujuan. Dalam formulasi kebijakan peran politik sangat besar, dimana politik cukup mempengaruhi proses implementasi sebuah kebijakan. Analisis kebijakan harus dapat memperkirakan suatu reaksi kebijakan. Dimana analisis harus mampu menggambarkan alasan daripada panduan-panduan.

Setiap kebijakan pasti memiliki tujuan dalam implementasi kebijakan tersebut. Masyarakat pasti mempertanyakan apasih tujuan dari pembangunan stadion? Dalam hal ini pembangunan stadion memiliki tujuan untuk memajukan sektor olahraga di gresik, ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Informan 5 yang mengatakan:

“tujuannya ya membangkitkan olahraga tentunya, yang dulu persegres itu dikenal sampai tingkat nasional, persegres itu milik masyarakat gresik, tapi pemerintah kabupaten gresik, tidak punya lapangan olahraga. Selain itu pertama bahwa kita itu nanti akan, tahun 2017 kita akan menjadi tuan rumah porprov, tahun 2021 kita akan menjadi tuan rumah asian youth games, jadi stadion itu diperuntukkan untuk menjamu regional porprov, yang

internasional asian youth games. jadi, apa pembangunan GOR tidak hanya untuk untuk memajukan sektor olahraga, tapi side effect yang ingin diciptakan juga adalah pertumbuhan ekonomi, setiap ada kegiatan akan muncul ekonomi baru, lah gresik ini, ingin memunculkan mungkin kalo ada event, nanti ada mungkin souvenir, ukm-ukm disamping itu juga kita menciptakan pameran, kalo tidak ada event itu masih bisa digunakan.”

Diperjelas oleh keterangan dari Informan 4 yang mengatakan:

“sebenarnya sudah ada di RPJM, ya disitu sebenarnya sudah ada sih, ada sebenarnya untuk atlet, terkait dengan percetakan atlit, yang kedua kabupaten kan belum punya stadion. Nah terus kami kan punya klub bola, karena stadion juga kalo bisa dimanfaatkan bisa dikelola dan dipergunakan dengan baik, dapat meningkatkan PAD, terus destinasi wisatanya juga meningkatkan?, tidak melulu soal stadion saja, nantinya kita kan tahunya secara kompleks,”

Dijelaskan melalui wawancara dengan instansi terkait, dimana pembangunan ini nantinya diharapkan dapat membantu Gresik sebagai tuan rumah Porprov (pecahan olahraga provinsi) tahun 2017, selain itu juga ada event internasional yang akan dilaksanakan di Gresik yaitu Asian Yotuh Games tahun 2021. Dengan adanya event yang skala provinsi sampai dengan internasional, diharapkan dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi Gresik. Karena dengan adanya event-event yang nantinya ada di gresik, maka mengundang masyarakat baik dari wisatawan domestic, dan wisatawan mancanegara. Sehingga secara tidak langsung dapat menumbuhkan perekonomian karena menjadi tempat berkumpulnya warga. Sehingga proses ekonomi nantinya juga berlangsung disana.

III.II Pro-Kontra Pembangunan Stadion BukitLengis

Dalam setiap kebijakan yang cukup kontroversial selalu ada dinamika dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Dimana adanya Pro dan Kontra dalam kebijakan merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi saat ini, dimana setiap individu berhak untuk memberikan penilaian baik positif maupun negative. terkait dengan pembangunan Stadion Bukit Lengis di Kabupaten Gresik ini terjadi perdebatan baik masalah lokasi, anggaran, serta perlu tidaknya dilakukan pembangunan Stadion pada saat ini. dalam hal ini dijelaskan mengenai gambaran tentang Pro-Kontra dalam pembangunan Stadion.

III.II.I Pro Pembangunan Stadion Bukit Lengis

Dukungan terhadap sebuah kebijakan selalu dilandasi dengan adanya kepentingan tertentu. Dimana dalam hal ini kubu Pro kebijakan pembangunan stadion dari hasil yang ada dilapangan menjabarkan beberapa argument mengenai dukungannya terhadap Pembangunan Stadion. Dimana didalamnya terkait tujuan pembangunan stadion nantinya untuk jangka panjang, selain itu belum memilikinya pemerintah dalam hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Gresik, menjadi salah satu alasan dukungan dalam pembangunan stadion.

- Peningkatan Fasilitas Olahraga

Pertama pembangunan stadion dianggap sebagai kebutuhan yang memang di butuhkan oleh masyarakat Gresik. Mengingat sejarah kabupaten Gresik yang merupakan salah satu Kota Bola, yang didalamnya terdapat salah satu kesebelasan sepak bola nasional yaitu, Persegres. Selain itu untuk peningkatan fasilitas olahraga, karena Gresik belum memiliki stadion yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Hal ini diperjelas oleh Informan 5 yang mengatakan:

“untuk awalnya pembangunan olahraga, pemerintah daerah itu belum mempunyai tempat stadion olahraga, yang melatar belakangi pertama muncul adalah untuk membangun itu karena pemerintah daerah belum punya. tujuannya ya membangkitkan olahraga tentunya, yang dulu persegres itu dikenal sampai tingkat nasional, persegres itu milik masyarakat gresik, tapi pemerintah kabupaten gresik, tidak punya lapangan olahraga, contohnya pertama adalah, pemerintah dengan mempunyai fasilitas ini olahraga diharapkan naik, yang kedua pelaku olahraga sendiri itu terbantuan, yang berikutnya indonesia umumnya khususnya jawa timur, khususnya lagi kabupaten Gresik. Memiliki stadion yang representative untuk pelaksanaan-pelaksanaan pertandingan”

Diperkuat oleh argumentasi dari Informan 4 yang mengatakan:

“Eh karena selama ini kabupaten gresik punya stadion tapi kan tidak punya petro. Yang punya pemerintah daerah sendiri kan tidak punya. Kemudian sesuatu yang sifatnya monumental itu kan jelas kelihatan walaupun, mungkin hasil pembangunannya bertahap tidak terdapat langsung ke masyarakat.”

Dengan adanya sejarah tersebut menjadi landasan bagi masyarakat yang Pro di dalam pembangunan stadion. Ini diperkuat dengan wawancara kepada pihak Ultras, yang merupakan supporter klub Persegres, Informan 1 mengatakan:

“saya rasa sangat penting ya itu saja ya saya rasa dikarenakan di gresik ini eh inget eh yang diucapkan dari almarhum gusdur dulu gresik itu kan yang dikenal tiga, industry, kota wali, dan kota bola, itulah makannya yang dikenal kan tiga itu. Makanya itu bukan-bukannya kami menganut apa yang disampaikan oleh gus dur, itu juga bener karena kita kan selama ini sepakbola tidak putus dari tahun ke tahun, kan tidak pernah absen, tapi dalam hal ini kan ga punya stadion sendiri, alangkah baiknya kan pemda dalam hal ini memfasilitasi sendiri tidak menggantungkan kepada pinjam ke petrokimia, itu kan sifatnya pinjam, Cuma bagaimanapun sifatnya pinjem itu kan ibarat pinjem itu kan kita tidak tahu sampai kapan dipinjamkan.”

Dengan adanya stadion ini nanti diharapkan dapat menjadi fasilitas baru yang dapat dibanggakan oleh masyarakat Gresik. Karena walaupun sebelumnya kabupaten Gresik sudah memiliki stadion yang cukup representative, yaitu stadion Tridharma. Namun status stadion tridharma yang hanya pinjaman ditakutkan akan menjadi boomerang ketika penggunaan stadion bersamaan dengan acara lain. sehingga dengan adanya pembangunan stadion Bukit Lengis ini diharapkan menjadi wadah bagi Persegres untuk menghadapi kompetisi Nasional yang dilakukan oleh PSSI.

Keinginan untuk menjadikan Gresik sebagai tempat percetakan atlet yang nantinya dapat mengharumkan nama Gresik pada khususnya dan dapat menjadi bibit-bibit atlet yang mewakili, membanggakan serta dapat mengharumkan indonesia ketika mengikuti ajang-ajang regional, nasional, bahkan internasional. Karena nantinya fasilitas-fasilitas penunjang akan dibangun bertahap sesuai dengan master plan yang ada. Diharapkan dengan adanya pembangunan Stadion ini akan menjadikan Gresik

sebagai daerah yang cukup serius dalam peningkatan fasilitas olahraga dan pencetakan atlet.

Bangunan yang cukup megah, dapat menjadikan Gresik sebagai wilayah dengan pembangunan yang cukup pesat, sehingga kesan kedaerahan yang disandang dapat menjadi salah satu daya tarik untuk menjadikan Gresik lebih menjadi daerah yang lebih baik. Peningkatan-peningkatan fasilitas olahraga diharapkan dapat menjadikan Gresik menjadi sentral dari kegiatan pembinaan atlet. Karena dari beberapa tahun terakhir Gresik hanya menjadi pengembira di ajang regional Pekan Olahraga Provinsi.

- Side effect yang diharapkan

Kedua Dalam sebuah pembangunan pasti ada masterplan yang nantinya diharapkan menjadi impact yang positif mulai dari masyarakat, sampai pemerintahpun mendapatkan sesuatu dari Pembangunan Stadion ini. pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dapat menjadikan sesuatu yang bernilai bagi pembangunan daerah tersebut. Tidak hanya melulu soal pencetakan atlet namun dapat memiliki impact positif yang lain mulai dari peningkatan PAD (pendapatan asli daerah), wadah bagi promosi wisata, serta menjadi fasilitas yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk bersosialisasi.

Hal ini diperjelas dengan wawancara bersama Informan 4 yang mengatakan:

“selama itu bisa menaikkan PAD itu kan kita investasinya kan investasi bukan investasi yang gak jelas begitu ya , jadi kalau seumapa itu dapat dikelola dengan baik mungkin bisa menjadi salah satu wisata jadi kalau sudah masuk ajang internasionalkan saya rasa semua orang pasti kesini. Kita bisa mendompleng kemana saja, kita bisa tarik ke bawean..sebenarnya formulasinya ke arah situ multi efectnya juga banyak karena kita juga nantinya ingin daya saing pariwisata kita belum tersentuh, dalam artian kita mulai gali tapi promotenya kurang. Mereka gatahu bahwa oh disini tuh ada hal yang menarik. Gitu lo, bawean itu kan balinya jawa timur. Terus wisata-wisata religi itu juga perlu ditingkatkan lagi. Packaging nya gitu, mungkin bisa kontribusi lewat CSR, jadi apa ya memang suatu masalah kan bisa dilihat secara positif dan negative kan, tergantung cara pandang, memang secara langsung kan tidak kedirect langsung.”

Selain dari bappeda juga diperkuat dengan hasil wawancara bersama Informan

5. Yang mengatakan:

“jadi, apa pembangunan GOR tidak hanya untuk untuk memajukan sektor olahraga, tapi side effect yang ingin diciptakan juga adalah pertumbuhan ekonomi, setiap ada kegiatan akan muncul ekonomi baru, lah gresik ini, ingin memunculkan mungkin kalo ada event, nanti ada mungkin souvenir, ukm-ukm disamping itu juga kita menciptakan pameran, kalo tidak ada event itu masih bisa digunakan.

Pembangunan sarana dan prasarana dalam perkembangan sebuah daerah harus selalu mengalami pertumbuhan kearah yang lebih baik. Selain pembangunan fisik yang dilakukan untuk menunjang kebutuhan daerah dimana stadion ini menjadi salah satu sarana dan prasarana yang ada. Namun pembangunan non fisik juga perlu ditingkatkan. Seperti Sumber Daya Manusia (SDM), regulasi atau kebijakan. Pengembangan SDM secara memadai menjadi salah satu tolak ukur pengembangan daerah, selain itu side effect untuk meningkatkan daya dukung pengembangan

pembangunan yang nantinya dapat menjadi lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat.

Stadion Bukit Lengis termasuk salah satu proyek yang nantinya multifungsi, dimana untuk mendukung perkembangan daerah dalam penyediaan fasilitas layanan untuk publik secara memadai. Baik mencakup fasilitas yang ada maupun fasilitas penunjang yang akan ada didalam proyek pembangunan stadion. Selain itu nantinya pembangunan stadion ini menjadi salah satu tempat untuk pengembangan wisata yang ada di Gresik. Mengingat lokasi yang dipakai strategis, diharapkan nantinya dapat membantu perekonomian warga sekitar. karena nantinya stadion ini menjadi tempat berlangsungnya event-event internasional.

III.II.II Kontra Pembangunan Stadion Bukit Lengis

Penolakan terhadap sebuah kebijakan selalu dilandasi dengan adanya kepentingan tertentu. Dimana dalam hal ini kubu Kontra kebijakan pembangunan stadion dari hasil yang ada dilapangan menjabarkan beberapa argumentasi mengenai Penolakannya terhadap Pembangunan Stadion. Dimana didalamnya terkait dengan Prioritas Pembangunan, masalah Lokasi, dan masalah penganggaran menjadi concern alasan penolakan dalam pembangunan Stadion.

Dalam pembangunan yang dilaksanakan tidak selalu dapat menjanjikan kebaikan, dan tidak langsung melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi orang

banyak. Dimana banyak hal-hal negative terhadap tatanan sosial kemasyarakatan. Yang didalamnya menyangkut kesenjangan, konflik sosial, matrealisme dan kekerasan kolektif. Dalam hal pembangunan Stadion ini dibarengi dengan hal-hal negative yang ada seperti

- Perencanaan Pembangunan Stadion

Suatu pembangunan yang dilakukan di sebuah daerah pasti memiliki tujuan atas dibangunnya suatu proyek yang prestisius. Dalam hal ini pembangunan stadion awalnya merupakan persiapan kabupaten Gresik dalam menghadapi persaingan untuk menjadi tuan rumah event internasional antar Negara yaitu sea games dan asian games namun kalah dalam pemilihan tuan rumah. Namun, yang menjadi pertanyaan ketika kabupaten Gresik kalah menjadi tuan rumah kok malah tetap dibangun?.

Hal ini diperjelas dengan wawancara dengan lembaga swadaya masyarakat di Gresik yang ikut menolak dilakukannya pembangunan stadion, yaitu Informan 3 dari Pusat demokrasi dan kemanusiaan (Pudak) yang mengatakan:

“dulu rencana pembangunan stadion itu buat adanya rencana sea games dan ternyata pas waktu pemilihan itu gresik kan kalah, lah harusnya perencanaan pembangunan stadion itu tidak disahkan, dan itu tetap dibangun dan akhirnya merelokasi warga di grand Verona bunder.”

Dalam pembangunan yang dilakukan di lokasi tersebut harus merelokasi sekitar 51 kepala keluarga. Karena pembangunan stadion membutuhkan lahan yang cukup luas. Mengingat tanah yang digunakan untuk membangun stadion tersebut merupakan tanah Negara dan Pemerintah Kabupaten. Sehingga warga disana harus dilakukan relokasi, karena mereka sudah memiliki bangunan rumah, baik bangunan permanen sampai permanen. Yang diganti sesuai dengan klasifikasi rumah dan disesuaikan dengan harga yang dianggap pantas oleh pemerintah kabupaten.

Penggantian yang diberikan kepada masyarakat yang direlokasi diberikan tanah yang berlokasi di daerah Bunder, dimana ada pengembang perumahan yang mau untuk menampung adanya warga yang direlokasi didaerah terdampak pembangunan stadion yang ada didaerah segoromadu. Namun untuk pembangunan rumah ada negoisasi tertentu antara warga dengan pihak pengembang. Dimana pemerintah kabupaten hanya bertanggung jawab untuk melakukan penggantian rumah yang dibangun, biasa disebut dengan “ganti boyong”.

Kalah menjadi tuan rumah menurut kawan-kawan kontra seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak melakukan atau menunda pembangunan stadion tersebut. Karena masih banyak aspek-aspek lain yang perlu perhatian daripada membangun stadion. Dengan adanya pembangunan stadion, pemerintah dianggap terlalu memikirkan sesuatu yang impactnya belum tentu dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

- Masalah Lokasi Pembangunan Stadion

Pembangunan stadion yang dilakukan di area sekitar desa segoromadu itu menuai permasalahan dimana didaerah tersebut terdapat area yang didalamnya merupakan situs cagar budaya yang pada saat itu merupakan monumen perang antara masyarakat Gresik dan penjajah. Wilayah Gresik yang berdekatan dengan kota Surabaya, menjadi salah satu area terdampak peperangan pada saat itu.

Monumen Perjuangan Gunung Lengis yang berada di Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ini memiliki tinggi sekitar 7 meter. Selain patung seorang pejuang, Kapten Doelasim, yang menancapkan sang saka merah putih, monumen ini memiliki pondasi segi lima yang tiap sisinya terdapat pahatan indah hasil karya Gun Wibowo.

Gunung Lengis menjadi saksi sejarah pertempuran sengit arek-arek Gresik, yang tergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat, Huzbullah, dan Sabilillah melawan Sekutu. Kompleks Gunung Lengis merupakan garis pertahanan paling depan membentang dari Pantai Karangkring sampai Desa Sumber. Monumen Gunung Lengis diresmikan 1 Oktober 1976, untuk mengenang keberanian para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Hal ini dijelaskan oleh kawan-kawan lembaga swadaya masyarakat (lsm) yang menolak adanya pembangunan stadion tersebut karena lokasi tersebut

merupakan cagar budaya yang harus di jaga. Ini diperjelas dengan wawancara bersama kawan-kawan Puduk gresik, Informan 3 mengatakan:

“alternatifnya itu tidak dilokasi tersebut, karena gunung lengis itu memiliki sisi historis, ada monument ada makam, dan pas pemaparan awal itu monument itu tidak akan dibongkar, namun pada saat proses pembangunan, padahal monument-monumen itu kan symbol, patung pahlawan kan symbol karena disitu ada makam-makam pahlawan yang jasadnya tidak utuh kayak tinggal tangannya, kepalanya, itu dimakamkan disitu. Dibangun patung sebagai penanda. Lah anehnya bangun kan prosesnya kan lebih lama kan itu harus dikeruk, kan gunung, lah kerukannya itu dibawa kemana? Jadi pertanyaan kan itu, lokasinya kan gunung lengis, dikeruk, berapa hektar, lah itu.”

Selain adanya monument perjuangan didaerah segoromadu, bukit lengis. Kawan-kawan kontra juga memaparkan bahwa disana juga merupakan lokasi makam, selain itu juga ada beberapa alasan mengenai ketidaksetujuan mereka karena kontur tanah yang ada disana merupakan kontur daerah yang rawan, seperti yang dijelaskan oleh Informan 2 dari PC.PMII gresik:

“ya karena pada sisi geografisnya, pada sisi tata letaknya, kita kurang sepakat. Karena pada dasarnya gunung lengis itu rawan, kontur tanahnya itu sering longsor, terus kedua pembangunan disana yang katanya dibuat stadion itu kalo kita kaji sepakbola di indonesia ya, sering tawuran disana mengakibatkan hal-hal yang fatal apalagi berdekatan dengan kota Surabaya. Dan yang ketiga rencana sambari mendirikan stadion lengis itu karena sea games dia yakin padahal konteks hari ini masyarakat belum disejahterakan ngomong masalah pendidikan,banjir di selatan sampai hari ini belum terselesaikan, anggarannya kalo tidak salah 170 milyar”

Pemilihan lokasi yang memicu permasalahan karena anggapan kawan-kawan yang menolak adanya pembangunan stadion tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah kabupaten Gresik tidak peduli dengan sejarah daerahnya. Dimana monument yang seharusnya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Gresik harus diratakan dengan tanah karena adanya pembangunan Stadion. Selain itu lokasi merupakan sentral jalan antar kabupaten Gresik dan Kotamadya Surabaya yang pasti mengalami kemacetan di jam-jam pagi maupun sore mengingat jam-jam itu merupakan jam berangkat maupun pulang baik yang bersekolah maupun bekerja.

Pembangunan stadion yang berdekatan dengan kota Surabaya juga menjadi pertimbangan mengingat kedewasaan supporter bola yang ada di Indonesia memiliki kesadaran yang rendah, dibangunnya stadion merupakan salah satu pemicu berkumpulnya supporter untuk melihat pertandingan tim yang mereka dukung, namun pada saat ini setiap pertandingan sepak bola yang ada di Indonesia selalu diwarnai selisih paham antar supporter yang nantinya ditakutkan memicu konflik baik didalam dan diluar stadion. Mengingat lokasi pembangunan stadion itu merupakan wilayah sentral penghubung antara kota Surabaya dan kabupaten Gresik. Ditakutkannya apabila terjadi gesekan nantinya akan merugikan warga sekitar stadion apabila terjadi kerusuhan dan pengerusakan.

- Penganggaran Pembangunan Stadion

Dalam sebuah pembangunan selalu diberengi dengan anggaran yang harus dikeluarkan untuk implementasi pembangunan tersebut. Pembangunan yang besar pasti membuat pengeluaran anggaran yang cukup besar. Pemerintah daerah Gresik yang merupakan salah satu daerah penyangga kota Surabaya, membuat pemerintah daerah Gresik tidak mau kalah dengan pembangunan baik dengan Surabaya maupun daerah lain.

Pembangunan stadion yang murni dari APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah) menjadi polemik tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan. Pembiayaan anggaran secara multi years ditakutkan menjadi boomerang bagi pemerintah daerah. Seperti yang diungkapkan oleh kawan-kawan LSM Pudak, Informan 3 yang mengatakan:

“ya karena pembangunan itu bukan prioritas utama, karena masih banyak hal-hal yang lebih diutamakan terutama kemiskinan, bencana banjir, seharusnya yang diprioritaskan perbaikan saluran irigasi dari perairan teluk lamong, sampai ke muara kali lamong, tapi kok anehnya justru malah perbaikan saluran irigasi jadi anggarannya dipangkas dan dibuat penambahan anggaran pembangunan stadion, bakal dari apa alasan-alasan pembangunan stadion itu apa, kabupaten gresik tidak bisa menjadi tuan rumah, alasannya adalah salah satu syarat klub adalah tim sepakbola itu seharusnya memiliki stadion sendiri”

Menurut kawan-kawan Lsm pudak dalam sebuah pembangunan fasilitas penunjang daerah diperlukan yang namanya prioritas-prioritas yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembangunan stadion masih belum menjadi prioritas mengingat Gresik menjadi kawasan langganan banjir, dimana kawasan-kawasan khususnya didaerah

aliran kali lamong selalu menjadi korban dampak banjir. Selain itu pemangkasan anggaran yang dilakukan untuk pembangunan stadion menjadi salah satu alasan bagi kawan-kawan yang menolak pembangunan untuk terus melakukan aksi. Karena dampak banjir selain kerugian materiil juga korban jiwa. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 3 yang mengatakan:

“yang jelas bagi kita sih ada prioritas utama, dan yang harusnya dijadikan prioritas kan pembangunan irigasi, itu dulu karena mengingat dari tahun 2010 itu sampai tahun 2015 anggaran untuk perbaikan dan penanggulangan banjir itu semakin berkurang, dan dipangkas untuk pembangunan stadion. Gitu loh, lah akhirnya kan yang lebih utama, itu yang mana? Keselamatan warga ngomong dampak banjir karena terakhir banjir yang paling besar, menenggelamkan tiga orang, dari pada pembangunan stadion kan itu, kalo stadion itu lebih utama, kita dukung pembangunan stadion tapi ini kan bukan utama, jadi ya prioritas utama, kalo bisa seperti itu,”

Pembangunan yang mulai dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gresik melalui dua tahapan pembangunan, dimana tahap pertama menghabiskan anggaran sebesar Rp. 230.000.000.000,00. Dimana nantinya proyek ini dianggarkan secara multi years dari tahun 2012-2015. Pada tahun 2012 dilakukan studi kelayakan dan pembangunan dimulai dari tahun 2013 dan diharapkan akan rampung pada Mei 2015. Dimana pembagian anggaran per tahun yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 50.000.000.000,00. Sedangkan, tahun 2013-2015 sebesar Rp 60.000.000.000,00. Dimana pada tahap 1 ini mencakup 35 persen tribun lima lantai berkapasitas 25 ribu penonton akan diselesaikan pada juni 2015.

Sedangkan tahap kedua membutuhkan anggaran Rp. 40.000.000.000,00. Nantinya akan dibangun lima lantai tribun yang nantinya akan mengelilingi seluruh stadion dengan kapasitas total yang nantinya menjadi 48 ribu penonton. Lokasi Bukit Lengis sendiri merupakan wilayah perbukitan dimana stadion Bukit Lengis ini membutuhkan luas sekitar 13 hektar. Namun anggaran untuk tahap kedua menurut sumber dari dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik akan diusahakan untuk meminta bantuan APBN. Namun setelah melalui wawancara dengan DPRD nantinya pembangunan tersebut murni dari APBD.

III.III Kontestasi Antar Kelompok Masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Stadion Bukit Lengis

Sebuah kebijakan tentunya akan melibatkan banyak pihak yang berperan dalam perumusan samapi imlementasi kebijakan tersebut, baik secara aktif maupun pasif. Kebijakan pembangunan Stadion Bukit lengis ini kemudian menjadi salah satu kebijakan yang cukup menjadi perdebatan hangat di masyarakat gresik pada saat itu. dalam hal ini masyarakat dikategorikan menjadi dua kubu, ada kubu pro dan ada kubu yang kontra terkait dengan kebijakan pembangunan stadion tersebut. Namun awalnya seluruh organisasi masyarakat yang berhasil dilakukan wawancara mengungkapkan bahwa semua elemen masyarakat menolak adanya usulan kebijakan tersebut. Dimana kebijakan tersebut dianggap menjadi salah satu keinginan pemerintah daerah yang cukup berlebihan.

Hal ini diketahui setelah melakukan penelitian dan wawancara di tiga kelompok masyarakat yang diwawancarai, yaitu Pudak (pusat demokrasi dan kemanusiaan), PC PMII Gresik, dan tentunya kelompok supporter Gresik yaitu Ultras. hal ini awalnya diungkapkan oleh Informan II yang mengatakan bahwa seluruh elemen masyarakat yang terkait setuju untuk menolak adanya kebijakan tersebut, dibuktikan dengan hasil wawancara seperti berikut ini, Informan 2 mengatakan:

“waktu itu kita demo mengumpulkan aliansi termasuk pudak, forkot, MGPK, kawan-kawan gerakan yang bisa kita ajak untuk ikut aksi. Kita melakukan demonstrasi di DPRD, di bupati, awalnya fans ultras itu ikut kita, mereka sepakat mempertanyakan kenapa kita menolak dll. Dan pada saat dua kali ikut demonstrasi mereka tidak ikut. Ini aku curiga, ngapain nih? Itu gak ikut, terus dia ikut pihak yang pro, makannya, lama kelamaan kita juga bertegangan dengan temen-temen ultras, kok bisa kayak gini lo ya biarkan saja tetapi kita tetep melawan pada waktu itu.”

Hal ini juga diperkuat dengan wawancara bersama kawan-kawan pudak yang pada saat itu diwakili oleh Informan 3 yang mengatakan bahwa:

“kalau kelompok ultras itu kan awalnya menolak, tetapi gatahu kenapa di tengah-tengah perjalanan mereka menyatakan dukungan dengan percepatan stadion, ga ada sih pergesekan langsung, tapi kan kalo ada perbedaan pendapat, persepsi kan wajar. Ada yang pro dan ada yang kontra itu kan wajar. Tapi kalau sampai gesekan secara langsung kita enggak.”

Sebelumnya kawan-kawan ormas yang ada di kabupaten Gresik satu suara terhadap penolakan kebijakan pembangunan tersebut. Dimana kawan-kawan kontra berkoalisi untuk membuat suatu kekuatan yang dapat menggagalkan adanya

kebijakan tersebut. Dari hasil wawancara dengan PMII ditemukan data bahwa penolakan tersebut dilakukan oleh berbagai ormas-ormas yang ada mulai dari MGPK, Forkot (forum kota), Pudak, serta Ultras. sebelumnya kawan-kawan kontra setidaknya sudah dua kali mengundang kawan-kawan Ultras untuk melakukan aksi. Namun, dalam dua aksi tersebut kawan-kawan Ultras tidak hadir, sehingga menimbulkan spekulasi-spekulasi di internal kawan-kawan yang kontra terhadap pembangunan stadion. Namun, temuan dilapangan yang membuat adanya perpindahan kubu dari kawan-kawan ultras yang awalnya kontra menjadi pro membuat pertanyaan baru yang ingin dijawab. apa alasan mereka berpindah haluan dalam menyikapi adanya kebijakan pembangunan stadion tersebut.

Hal ini juga diakui oleh kawan-kawan ultras, mereka awalnya menolak pembangunan stadion. Namun, pandangan yang diungkapkan oleh Informan I mengatakan kontranya mereka lebih kemasalah lokasi yang dianggap terlalu rawan untuk dijadikan pembangunan stadion sesuai dengan hasil wawancara berikut ini, Informan 1 mengatakan:

“sebenarnya kontranya kita itu bukan masalah apa-apa, masalahnya itu kan cuma di letak saja, memang kita dari dulu itu menyuarakan dari dulu itu harusnya sudah memiliki stadion sendiri. Karena ya mohon maaf, karena gresik ini kan, untuk bola kan tiap tahunnya kan memang ada kita juga punya tim, tapi kita tidak punya stadion sendiri, kan aman. Selama ini kan kita pakai yang petro itukan bukan milik pemda, kan milik perusahaan, jadi dulu ya sempet ada pro dan kontra. Cuma adanya pro kontra itu bukan masalah apa-apa, Cuma masalah tempat saja.”

Dalam hal ini isu merupakan dasar dari meretasnya sebuah kebijakan. Suatu isu dapat menjadi sebuah kebijakan ketika isu tersebut melwati proses opini public menjadi agenda kebijakan dan akhirnya menjadi sebuah kebijakan. namun tidak seluruh kebijakan melalui tahapan yang sama bergantung dimana dan arahnya kemana kebijakan itu dibuat. Penggunaan dan interpretasi dari hasil kajian analisis kebijakan akan tergantung kepentingan-kepentingan yang ada dalam system politik. Dengan demikian analisis kebijakan akan selalu di sangkut pautkan dan di pertanyakan. Apakah hal tersebut diperlukan atau memberikan solusi permasalahan yang ada. Dimana kebijakan public akan dipengaruhi oleh interest group yang ada.

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, biasanya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya sendiri yang mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Kebijakan pembangunan stadion yang dianggap menjadi kebijakan yang terlalu dipaksakan mengingat sudah ada keberadaan stadion petro kimia yang menjadi home base bagi persegres saat ini menurut kawan-kawan kontra.

III.III.I Kepentingan Masing-Masing Kelompok Masyarakat

Perdebatan antara dua kelompok masyarakat yang mengalami pecah kongsi dalam hal ini dapat ditarik menjadi sebuah Kontestasi, dimana kedua kelompok ini berjuang untuk menjadikan kepentingan yang mereka inginkan dapat tercapai. Perbedaan kepentingan yang awalnya sejalan tiba-tiba berubah karena ada salah satu pihak yang memilih untuk mendukung kebijakan pembangunan stadion. Menjadi salah satu konflik yang ada dalam dinamika pro-kontra kebijakan pembangunan tersebut. Dimana masing-masing pihak bersikukuh untuk menyampaikan pandangannya terhadap kebijakan yang ada.

Dalam hal ini konsep kontestasi masuk karena kedua belah pihak ini mengatasnamakan kepentingan masyarakat, dan berhubungan dengan kebijakan. Yang dimana kebijakan pembangunan tersebut merupakan produk dari pemerintah daerah dan menjadi masalah public dimana menyangkut kepentingan orang banyak, mengingat jumlah anggaran yang dikeluarkan bisa dibilang cukup besar.

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama PMII dan pudak yang mengatakan tujuan mereka dalam hal ini adalah untuk hajat hidup orang banyak. diungkapkan oleh Informan 3 yang mengatakan:

“yang jelas bagi kita sih ada prioritas utama, dan yang harusnya dijadikan prioritas kan pembangunan irigasi, itu dulu karena mengingat dari tahun 2010 itu sampai tahun 2015 anggaran untuk perbaikan dan penanggulangan banjir itu semakin berkurang, dan

dipangkas untuk pembangunan stadion. Gitu loh, lah akhirnya kan yang lebih utama, itu yang mana? Keselamatan warga ngomong dampak banjir karena terakhir banjir yang paling besar, menenggelamkan tiga orang, dari pada pembangunan stadion kan itu, kalo stadion itu lebih utama, kita dukung pembangunan stadion tapi ini kan bukan utama, jadi ya prioritas utama, kalo bisa seperti itu”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh kawan-kawan PMII gresik yang diwakili Informan 2, yang mengatakan:

“tetep pada kepentingan kita dalam setiap gerakan adalah kita memihak untuk kepentingan masyarakat, ada kontradiksi antara kepentingan sambari, kepentingan APBD, dinas pu itu kan kalo kita lihat mulai dari tahun 2010 sampai konteks hari ini 2015 ini anggaran banjir selalu di kebiri mas, tidak ada bukti nyata penyelesaian banjir itu seperti apa. Gimana bisa hilang banjir kalau tidak ada anggaran”

Menurut kawan- kawan pu dak dan PMII, pembangunan stadion saat ini bukan merupakan sebuah prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat adanya berbagai aspek yang dirasa kurang perhatian, seperti penanganan banjir yang terjadi di gresik selatan mengingat sudah ada korban jiwa dalam bencana tersebut. Mereka mengatakan anggaran yang digunakan untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada harus menjadi terganggu akibat adanya kebijakan pembangunan stadion yang menyedot anggaran APBD cukup besar, walaupun diakali dengan pembangunan yang menggunakan anggaran multi years.

Sedangkan Ultras yang awalnya menolak dan menentang kebijakan pembangunan stadion, dan akhirnya menjadi mendukung pembangunan stadion. Pasti

memiliki alasan untuk mendukung keberadaan stadion yang ada di Gresik. Tujuannya dijelaskan oleh Informan 1, yang mengungkapkan:

“ya mungkin gini, kita sendiri artinya kita kan, supporter, bagaimana pun kita kan eh , tujuan dari supporter kan untuk mendukung tim ya jadi, jadi apapun namanya ketika kita punya tim namun kita tidak memiliki stadion sendiri. Itu kan artinya meskipun itu punya pemda, lah otomatis kan kuatirnya kita nanti, ketika petro nanti tidak memberikan izin stadion itu dipakai untuk gresik, kita main dimana? Lah intinya kan disitu, makanya kita kan, tetep kita mendorong pada pemerintah, kan siapapun yang jadi pada saat itu, kan harus ada dalam skala prioritas, dan pada saat itu siapa pun yang jadi kontrak politik antara pihak bupati dan pihak dprd. Dan setiap pencalonan kan ada kontrak politik antara itu, pasti ada jadi, pembangunan mana yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritaskan Alhamdulillah toh akhir ini dengan dipimpin oleh pak sambari ini kan ya, sudah ada itu realisasinya. Kan aku juga gatahu progressnya itu gimana. Kapasitas yang ada itu memang dulu itu, ehm saiki ngene ae apa yang ingin ditanyakan oleh masnya, sebisa mungkin saya jawab, jadi enggak mencolot-mencolot gitu.”

Kawan-kawan ultras yang mendukung kebijakan pembangunan tersebut dikarenakan mereka adalah supporter, basis massa mereka adalah pecinta bola. Dimana dalam sebuah klub diharuskan memiliki stadion yang representative dalam penyelenggaraan pertandingan. Selama ini Gresik memang ada dua stadion yang representative, yaitu stadion semen Gresik dan stadion Tridharma Gresik. kedua stadion ini milik BUMN yang dalam pemakaiannya diharuskan membayar sewa. Biasanya persegres yang merupakan klub sepak bola Gresik memakai stadion Tridharma mengingat kapasitas serta standarisasi Stadion sudah dinyatakan layak oleh PSSI sebagai Homebase dari Persegres.

Namun dalam pemakaian stadion memang harus membayar sewa yang cukup tinggi. Sehingga dalam hal ini kelompok Ultras menginginkan adanya stadion baru yang dapat menjadi kebanggaan masyarakat Gresik secara umum, dan dapat dijadikan homebase baru bagi klub Persegres sehingga tidak perlu membayar biaya sewa yang cukup tinggi ketika memakai stadion milik petrokimia. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Informan I mengatakan adanya kontrak politik antara pak bupati dengan DPRD dalam skala prioritas pembangunan yang akan dilakukan. Jadi kawan-kawan ultras mendukung dan mendorong adanya kebijakan pembangunan stadion tersebut. Mengingat pembangunan tersebut menjadi skala prioritas pemerintah daerah Gresik dalam peningkatan Infrastruktur yang ada. Karena nantinya dapat menjadi representasi kabupaten Gresik memiliki fasilitas stadion yang cukup baik.

Dalam hal ini ketiga kelompok kepentingan yang sudah diwawancarai melakukan fungsi sesuai dengan fungsi yang ada dalam konsep kelompok kepentingan dalam mempengaruhi sebuah kebijakan yang ada dimana fungsi ketiga kelompok. kelompok kepentingan secara umum memiliki pengertian organisasi yang bekerja dilandaskan atas dasar kepentingannya. Dalam hal ini, kelompok kepentingan memiliki tujuan dan anggota yang dipersatukan untuk mencapai kepentingannya. kepentingan di sini bisa jadi berkaitan dengan pekerjaan, suku, kelas, dll.²⁷ Mulai dari

²⁷ Ornstein, Norman J. dan Shirley Elder. 1978. *Interest Groups, Lobbying and Policymaking*. United States : Congressional Quarterly Press.

fungsi ideologis, fungsi simbolik, fungsi ekonomi, fungsi Informasi, dan fungsi instrumental.

Kelima fungsi tersebut telah dijalankan ketiga kelompok kepentingan yang ada. Dalam hal mencapai tujuan untuk mempengaruhi kebijakan. Dari beberapa fungsi yang telah dijelaskan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok terbentuk sesuai dengan kepentingan yang mendasarinya tentunya juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan kepentingannya tersebut, namun secara umum setiap kelompok memiliki fungsi yang sama, yang membedakannya adalah kepentingannya.

III.III.II Upaya-Upaya Kelompok Kepentingan

Untuk mencapai tujuan suatu kelompok kepentingan pasti melakukan berbagai cara dan upaya untuk dapat masuk dalam memberikan opini serta mempengaruhi kebijakan yang ada. dalam hal ini masing-masing kelompok pro dan kontra memiliki cara yang hampir sama dengan menggunakan cara-cara seperti demonstrasi dan orasi untuk mempengaruhi public dalam melakukan lobi massa yang lebih besar. Untuk mendapatkan dukungan sesuai dengan masing-masing visi dari kelompok pro maupun kontra.



Gambar III.II Aksi Kawan-kawan Kontra di Depan Gedung DPRD Kab. Gresik

Seperti yang diungkapkan oleh kawan-kawan kontra yang melakukan demonstrasi untuk tujuan mempengaruhi kebijakan pembangunan stadion. Mulaidari kawan-kawan Pudak dan PMII, yang menyatakan cara untuk mempengaruhi kebijakan seperti yang diungkapkan oleh Informan 2 yang mengungkapkan:

“waktu itu kita demo mengumpulkan aliansi termasuk pudak, forkot, MGPK, kawan-kawan gerakan yang bisa kita ajak untuk ikut aksi. Kita melakukan demonstrasi di DPRD, di bupati, awalnya fans ultras itu ikut kita, mereka sepakat mempertanyakan kenapa kita menolak dll. Dan pada saat dua kali ikut demonstrasi mereka tidak ikut. Ini aku curiga, ngapain nih? Itu gak ikut, terus dia ikut pihak yang pro, makannya, lama kelamaan kita juga bertegangan dengan temen-temen ultras, kok bisa kayak gini lo ya biarkan saja tetapi kita tetep melawan pada waktu itu.”

Kemudian diperkuat oleh wawancara bersama kawan-kawan Pudak yang diwakili oleh Informan 3 yang mengungkapkan:

“ya mas ada skala prioritas yang lain mulai dari pembangunan saluran air, dimana harus dipikirkan kebutuhan primer dan sekunder dimana mulai dari pendidikan, angka pengangguran menurun dan lain-lainnya. Kita melakukan demo ya tapi kan itu dari pihak ee pemerintah kabupaten ini adalah tujuan utama karena kabupaten untuk klub sepak bola.”

Kelompok-kelompok kontra melakukan berbagai cara baik dengan demo, memberikan selebaran, dan melakukan pendekatan dengan budayawan dan kelompok-kelompok yang melakukan penolakan terhadap pembangunan stadion. Penolakan dilakukan tidak hanya oleh PMII dan Pudak melainkan kelompok masyarakat lain yang merasa satu suara dalam penolakan pembangunan stadion mulai dari MGPK, Lira, dan Forkot. Mereka melakukan upaya demonstrasi ke DPRD, ke kantor bupati, dan dinas Pekerjaan Umum, dalam upaya melakukan penolakan pembangunan stadion Bukit Lengis.



Gambar III.III aksi kawan-kawan Pro di Gedung DPRD Kab. Gresik

Sama halnya dengan kelompok yang menolak, kawan-kawan ultras yang melakukan upaya dukungan melakukan demonstrasi dan orasi ke kantor Pemerintah daerah Gresik. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 1, seperti berikut ini:

“kita dulu pernah melakukan orasi, kita juga pernah, artinya kita juga pernah melakukan orasi, ya kita sekedar melakukan silaturahmi membawa massa sedikit banyak, kita juga datang ke pemda. Artinya kita juga menginginkan harus, stadion ini harus ada. Maka pada saat itu kita ditemui oleh pak sambari, pak sambari mengatakan insyaallah dalam program kerja akan melakukan pembangunan stadion dan ternyata pembangunan stadion itu ada. Artinya dilaksanakan, dulu kan tetapi tempatnya disini kita juga sempat memprotes. Dan kami juga sebenarnya alasan kami juga masuk akal Cuma karena factor, dan pemda dalam hal ini kapasitasnya tidak punya tempat, atau lahan yang menjadikan itu akhirnya, sehingga tetep disini yang diutamakan. Dulukan kalo bisa tempatnya jangan disini karena berdekatan dengan kota Surabaya. Akses masuk dan keluarnya supporter kan juga bisa membahayakan, dan sini juga menyarankan untuk dibunder sana kan dekat dengan akses tol, kan itu masjadi akses keluar masuk supporter tamu, ataupun pemain itu kan dekat tol, kan apalagi dekat tol dibunder sana disamping itu juga alasan kami posisi stadion ini ada di tengah, otomatis kedatangan supporter ini dari berbagai arah, tidak mengganggu warga iya, tidak mengganggu kelancaran lalu lintas juga iya”

Di dalam upayanya mempengaruhi kebijakan kawan-kawan pro melakukan silaturahmi ke kantor pemda, dengan massa yang cukup banyak. Pada saat itu dilakukan konvoi mulai dari mabes Ultras yang ada di jalan proklamasi menuju ke kantor pemda, dimana konvoi tersebut banyak diikuti oleh kawan-kawan ultras, mengingat koordinasi yang dilakukan mulai dari korwil, korcab, dan semua pecinta bola diajak untuk ikut melakukan demonstrasi di kantor pemda.

Jumlah massa yang dikerhkan cukup banyak diharapkan mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk menemui kawan-kawan ultras. untuk membicarakan mengenai kebijakan yang akan diambil dan membicarakan tuntutan dari kawan-kawan pro yang ingin pembangunan stadion dipercepat proses kebijakannya dan segera dilakukan pembangunannya.

III.III.III Dominasi yang terjadi



Gambar III.II Bupati menemui Ultras, Bupati menggunakan batik, Informan I tiga dari kanan

Berbeda dengan kawan-kawan kontra, kawan-kawan Pro mendapatkan tempat pada saat melakukan demonstrasi di pemerintah daerah, mereka ditemui langsung oleh bapak Bupati Gresik, yang turun dari kantor pemda untuk menemui massa dari

kawan-kawan ultras. diberikan penjelasan ke kawan-kawan ultras, mengenai pembangunan stadion nanti itu seperti apa, dimana pada saat itu kawan-kawan ultras langsung berdiskusi dengan bupati, penolakan kawan-kawan ultras untuk masalah lokasi dijelaskan. Sesuai dengan wawancara diatas, diberikan penjelasan mengenai dana yang harus dikeluarkan oleh Pemda tidak sedikit. Pemilihan lokasi yang akhirnya berada di kawasan BukitLengis itu, seperti yang diungkapkan oleh Infroman 1 selaku ketua Ultras Gresik:

“Tapi karena pertimbangan mungkin dana juga, pak sambari juga bilang. Kalo kita mengalihkan ini ke tempat lain mas dana untuk yang kita belikan ya banyak toh, kan kalo disini kan dibutuhkan Cuma sekitar 10 hektar, kalo ga salah minimal untuk lapangan itu 15 hektar. Belum ada lahan parkir, kan planningnya itu kan begitu, kalo disini itu kan kurang memadai untuk lahan parkirnya mungkin factor dari dana tadi mungkin juga factor dari pak sambari itu tadi, supaya program stadion ini dekat jalan, ya akhirnya tetap disini. pada saat itu kita kan bisa melihat dampak dari nanti ketika supporter itu nanti pulang pergi kan memacetkan itu yang pertama dan yang kedua SDM kita supporter di indonesia kan belum dewasa. Jadi ketika nanti kena rusuh sedikit rame, ramanya kan bukan Cuma di dalam tapi juga diluar. Otomatis nanti kalau diluar yang dirugikan sekali itu biasanya tidak lepas itu kan pengerusakan. Pengerusakan nanti kan di takut kannya kena dirumah-rumah warga.tapi ya itu alasan pak sambari karena factor dana. Terus pak sambari juga bilang. Kalo ini saya taruh ditengah, ketika nanti ada kerusuhan itu kan nanti yang rusak semakin banyak. Artinya loh jawabanya pak sambari kok seperti ini. pintar pak sambari ini, ya kalo pak sambari pada saat itu rival itu, kalo kita sendiri sampai sekarang itu tidak punya rival. Cuman ketika ditakutkan kedatangan supporter yang notabene itu rival dari tetangga kita bonek itu juga repot sendiri. Yang repot kan itu keamanan, warga sekitar.”

Pemilihan lokasi Bukit Lengis menjadi kawasan dibangunnya stadion, pemerintah daerah mengungkapkan memiliki lahan yang cukup untuk melakukan pembangunan Stadion di sana, sehingga tidak perlu mengeluarkan dana untuk melakukan pembelian lahan baru yang mengingat lahan di Gresik mulai bersangsur-naik dan cenderung mahal. Selain itu wilayah yang cukup representative untuk pembangunan stadion dianggap nilai plus, supaya nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Gresik.

Dalam hal ini kawan-kawan yang pro terhadap kebijakan stadion diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi untuk memberikan pandangan maupun input untuk pembangunan stadion, dimana mereka diundang dalam musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah daerah Gresik, hal ini diungkapkan oleh Informan 1:

“ya dulu sempat di undang dan Alhamdulillah pak sambari juga aspirasi dari kita juga dipertimbangkan, ya jawaban dari beliau itu kan factor dana. Dan kita juga menyadari kalau dana terbatas. Karena di gresik harga juga mahal karena tanah juga mahal. Ini kan multi years, 4 tahun ya dari 4 tahun itu diharapkan selesai ya mungkin dalam satu tahun ini tidak mungkin selesai.”

Namun hal ini berbeda dengan hal yang dialami oleh kawan-kawan kontra, mereka tidak diberikan ruang untuk ikut dalam pembahasan pembangunan stadion, hal ini diketahui dari kawan-kawan padak yang diwakili oleh Informan 3 yang mengungkapkan:

“ga ada sih pergesekan langsung, tapi kan kalo ada perbedaan pendapat, persepsi kan wajar. Ada yang pro dan ada yang kontra

itu kan wajar. Tapi kalau sampai gesekan secara langsung kita enggak. pihak-pihak yang mendukung kan komunikasinya dengan pemkab, tidak dengan pihak yang kontra. Kan gitu”

Mereka memberikan gambaran kalau pemerintah pasti mengundang orang-orang maupun kelompok yang memberikan dukungan untuk melakukan pembangunan tersebut. Agar lebih mudah dalam pelaksanaan pembangunan stadion yang sekarang masih dalam tahap pengerjaan. Keterlibatan kelompok-kelompok kepentingan dalam proses politik tidak berhenti hanya dengan apa yang disebut lembaga-lembaga politik. Untuk mencapai tujuannya apabila tidak ada dukungan di kalangan legislator maka mereka biasanya melakukan aksi meminta bantuan dari masyarakat, untuk mendapatkan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Tidak jarang pula membuat demonstrasi, kericuhan apabila keinginan kelompok tidak dapat terealisasikan. Dominasi yang terjadi lebih kearah kelompok-kelompok yang pro, mereka menerima keuntungan dengan dapat masuk serta ikut dalam mempengaruhi dan ikut dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Dalam melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan, selalu dikaitkan hubungan antara masyarakat pro dan kontra seperti apa? apakah terjadi konflik? Atau bersinggungan? Atau sebatas menghargai pandangan masing-masing kelompok kepentingan?. Untuk menjawab pertanyaan diatas maka ini gambaran mengenai kondisi kelompok masyarakat pada saat pembahasan kebijakan pembangunan stadion.

Hasil wawancara dengan kawan-kawan kontra maupun pro menunjukkan bahwa hubungan yang ada pada saat itu saling menghargai saja. Ini dibuktikan dengan wawancara bersama kawan-kawan kelompok kepentingan, mulai dari Informan 2 dari PMII yang mengatakan:

“selama ini ya tidak sih Cuma demonstrasi-deminstrasi aja, ga pernah sampai bersinggungan gitu tidak, ya kita menghargai setiap gerakan-gerakan yang dilakukan, toh ini juga tujuannya untuk kepentingan bersama bagaimana pandangan kawan-kawan yang mendukung dan menolak kan wajar dalam menanggapi sebuah kebijakan”

Diperkuat dengan wawancara bersama kawan-kawan pudak, yang diwakili oleh Informan 3 yang mengungkapkan:

“kita kan tahu posisi kita masing-masing, itu kan yang selama perjalanan kita itu,kita saling menghormati saja, tidak sampai ada yang berlebihan sampai adu fisik kita tidak pernah. Kita sama-sama saling menghargai saja. Kan kita sama-sama dari awal kalo ada perkara seperti ini kan kita tidak tahu. Kita saling menghargai saja.”

Jadi untuk masalah kontestasi antara kelompok kepentingan yang pro maupun kontra sama-sama saling menghargai pandangan masing-masing. Mengingat adanya dua kubu yang bersebrangan pandangan ini tujuannya untuk memperbaiki tujuan dari pemerintah dalam mengatur prioritas yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan.

Kontestasi yang terjadi membuat adanya pemikiran mengenai afiliasi politik dari kelompok pro maupun kontra. Namun dalam hal ini ditemukan data wawancara yang cukup menarik dari informan 1 yang mengatakan:

“Alhamdulillah toh akhir ini dengan dipimpin oleh pak sambari ini kan ya, sudah ada itu realisasinya. Kan aku juga gatahu progressnya itu gimana. Kapasitas yang ada itu memang dulu itu,..... Ada fotonya kita, ketika pak sambari menemui kita, kita diluar pemda. Pak sambari turun, ada tendensi pro terhadap bupati ini, kita pro terhadap bupati ini.”

Mengingat pembangunan stadion merupakan wacana yang selalu digemborkan oleh bupati-bupati sebelumnya dan tidak dapat terealisasi, kemudian dengan adanya kepemimpinan baru yang dipegang oleh bupati Sambari membuat kawan-kawan pro memberikan apresiasi terhadap kinerja bupati, dimana data wawancara disebutkan ada tendensi pro terhadap pak bupati karena berhasil menjadikan pembangunan stadion sebagai skala prioritas dalam kebijakan pembangunandi Kabupaten Gresik. Kawan-kawan pro juga mendorong adanya kontrak politik yang terjadi antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mendesak percepatan pembangunan stadion.

Dalam proses agenda kebijakan public menurut Anderson (1984) ada tiga bentuk yaitu pola kerjasama, persuasive, dan pengarahan. Dimana dalam proses kerja sama ada system negoisasi, saling memberi dan menerima, dan kompromi. Persuasive lebih merujuk gimana kelompok actor meyakinkan kelompok actor lain dalam menentukan kebijakan public. Dalam hal ini kelompok formal (pemerintah) dan kelompok non formal (kelompok kepentingan, warga Negara Individual) ini

merupakan gambaran actor yang dapat mempengaruhi sebuah pembuatan maupun perbaikan kebijakan public.²⁸

Keterbukaan dalam berbagai proses pengambilan keputusan akan mendorong partisipasi masyarakat dan membuat para penyusun kebijakan public menjadi bertanggung jawab kepada semua yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sector public. Prinsip partisipatif seharusnya dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah masyarakat dapat menikmati faedah dari kebijakan itu sendiri.

Sistem Politik Gabriel Almond memberikan gambaran mengenai sistem yang cukup kompleks, dimana didalamnya mencakup keseluruhan actor yang ikut dalam proses politik yang nantinya memberikan suatu kebijakan yang dapat menjadi kepentingan seluruh pihak yang berada dalam sistem tersebut. Mulai dari eksekutif, kelompok kepentingan, legislative, dan badan lain yang berada didalam sistem berusaha saling mempengaruhi, dimana terjadi proses artikulasi kepentingan yang mengarah ke agregasi atau penggabungan kepentingan untuk menjadi kebijakan yang sesuai dengan sistem demokrasi yaitu kebaikan bersama.

Kelompok kepentingan diberikan ruang untuk memberikan input dalam pembuatan kebijakan. Selain itu menjadi wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses politik yang terjadi. Didalamnya terdapat sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik agar kepentingan-kepentingan masing-masing

²⁸ Muhlis madani.2011. *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. graha ilmu, Yogyakarta.

kelompok masyarakat dapat memberikan pengaruh serta memperjuangkan visi kelompok yang ada.

Dalam konteks formulasi kebijakan dimana para kelompok kepentingan berusaha untuk memenuhi tuntutan mereka melalui “lobby”, maka Greenwald (1977) menjelaskan adanya berbagai teknik lobby baik langsung (mempresentasikan pendapat atau fakta secara langsung kepada perumus kebijakan, berpartisipasi dalam bill drafting, pengujian pendengaran) maupun tidak langsung (tindakan konstituen, anggota kelompok kepentingan memperbesar dampaknya terhadap “grass-root” melakukan lobi dengan sejumlah anggota besar yang ada di dalamnya, teknik-teknik pengawasan situasi tertentu yaitu dengan mendramatisir berbagai isu yang ada, mengkampanyekan isu public melalui periklanan, dan protes).²⁹

Lobby-Lobby yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan lebih di dominasi oleh kelompok pro yang mendapatkan kesempatan untuk ikut langsung dalam proses perumusan kebijakan. Kedua kelompok sudah melakukan fungsi yang biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berpihak baik pro-kontra dalam kebijakan pembangunan tersebut. Memberikan dampak langsung dengan melakukan upaya-upaya yang dijelaskan sebelumnya.

²⁹ Ibid hal 36

Dalam system yang demokratis dan liberal setiap orang berhak mengajukan pendapat. Dimana bukan hanya diberikan oleh Negara, setiap warga Negara dilindungi oleh Negara dalam melakukan haknya untuk berpendapat. Dimana tidak ada pandangan maupun strata yang jelas entah anda professor maupun pengemis, dimata Negara kalian adalah warga Negara sehingga seluruh system pemerintahan serta kebijakan dibuat oleh warga Negara atau masyarakatnya sendiri. Inilah yang disebut dengan pandangan Pluralis.

III.IV Kepentingan-Kepentingan Yang Terlibat

Dalam sebuah system yang demokrasi selalu berhubungan dengan adanya pemerintah, Lsm (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan masyarakat. Yang nantinya akan memiliki kepentingan masing-masing. Kemudian terjadi Interaksi antar masing-masing sektor termasuk didalam proses dan perkembangan suatu daerah. Dimana keterlibatan seluruh sektor yang ada ini melahirkan apakah itu kepentingan elite semata yang nantinya dijadikan alat untuk memperkuat kekuasaanya atau memang menjadi sesuatu yang memang diberikan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini ada beberapa kepentingan-kepentingan yang terlibat dalam pembangunan stadion bukit lengis.

Demokratisasi di tandai antara lain, oleh maraknya berbagai kepentingan yang ada didalam suatu kebijakan, serta tak jarang menimbulkan konflik. Disebabkan oleh pemikiran antara lain kebebasan dan persamaan merupakan nilai yang ingin

diwujudkan oleh demokrasi didalam masyarakat. karena nilai-nilai tersebut merupakan syarat bagi persamaan menuntut adanya kebebasan berfikir, berpendapat, bersuara, berkumpul, dan berorganisasi. Didalam demokrasi tak jarang menjadi permasalahan baik konflik karena setiap kelompok maupun individu memiliki kepentingan masing-masing.

Hal ini pula yang terjadi dalam proses pembangunan stadion Bukit Lengis. Interaksi yang terjadi antar kepentingan baik antar elite maupun antar kelompok masyarakat yang ada. Proses ini akibat dari perbedaan pandangan dan presepsi dalam melihat kebutuhan akan hadirnya sebuah stadion di kabupaten Gresik. Keinginan untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas umum yang ada membuat adanya konflik yang terjadi di masyarakat Gresik. Mengingat ada anggapan mengenai keberadaan stadion yang sudah cukup representative.

Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memang menginginkan adanya perbaikan dari kualitas sarana dan prasarana fisik yang ada di Gresik. Pembangunan stadion yang dilakukan diharapkan dapat menambah pendapatan daerah yang nantinya dapat memperkuat sektor-sektor lain yang ada. Mulai dari keolahragaan, pariwisata, dan trade mark baru yang dapat dibanggakan oleh masyarakat kabupaten Gresik. Selain itu di lakukannya pembangunan stadion menjadi sebuah lapangan baru pada saat pembangunan serta selesainya pembangunan

yang nantinya dapat dijadikan sebagai lokasi event-event internasional yang secara tidak langsung dapat menambah pendapatan masyarakat maupun daerah.

Dalam sebuah kebijakan pasti terjadi adanya masalah, mulai dari pihak yang mendukung maupun menolak adanya pembangunan tersebut. Mulai dari pemerintahan baik eksekutif dan legislative sampai kelompok-kelompok masyarakat yang ikut andil dalam mempengaruhi kebijakan yang ada. Berbagai pandangan serta aspirasi yang dilakukan diharapkan dapat menjadi suatu nilai plus dalam kebijakan pembangunan stadion. Berikut merupakan pihak-pihak yang terlibat, peran masing-masing pihak serta kepentingan dibalik pembangunan stadion.

III.IV.I Legislatif

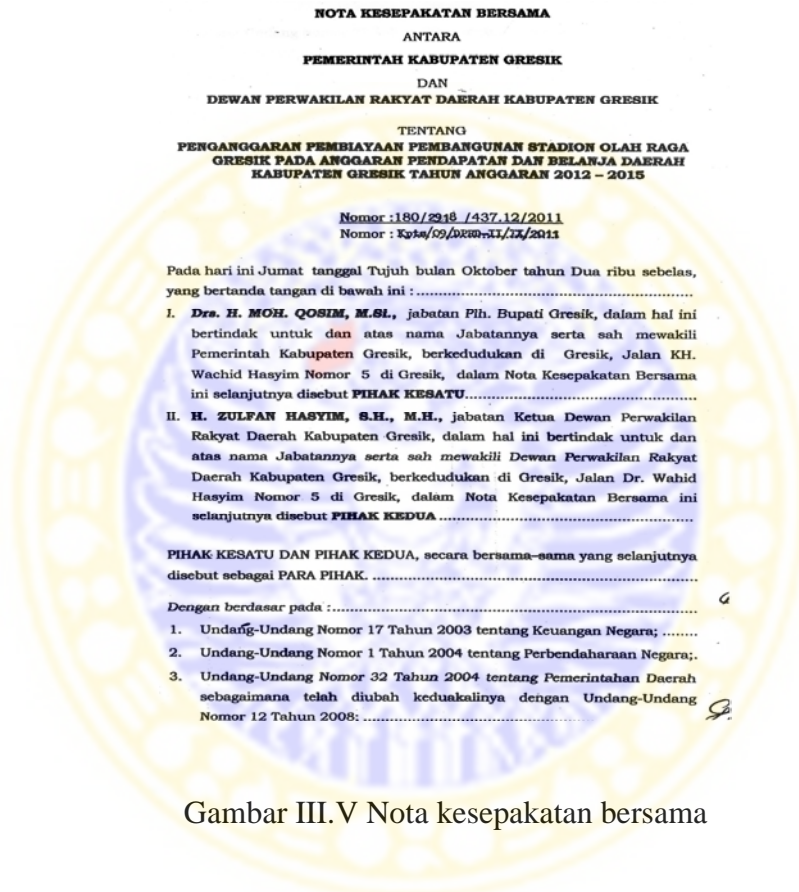
Peran legislative sebagai representasi dari masyarakat yang dapat memberikan pengaruh dalam pembangunan stadion di kabupaten Gresik. Dimana legislative sempat mengalami gejolak internal terkait permasalahan yang terjadi mengenai kebijakan pembangunan stadion. Anggota dewan yang ada menyoroti anggaran yang sangat besar dan digunakan untuk pembangunan stadion. Dalam pembangunan stadion yang mengalami pengerjaan yang cukup lama serta adanya penambahan anggaran dalam pembangunan menjadi concern anggota dewan dalam menanggapi pembangunan stadion. Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Informan 6 wakil ketua DPRD dari fraksi PPP yang mengungkapkan:

“jadi itu ada tambahan, tetapi bukan untuk pembangunan induknya. Tetapi tambahan diluar stadion, untuk lokasi, tambahan lapangan, parkir, lokasi pagar untuk kepentingan masyarakat tanpa bayar, jadi kalau masyarakat bermain disekitaran situ masyarakat tidak bayar. Fasilitas penunjang, bukan anggaran inti, kalau anggaran inti tidak boleh dirubah. 40 miliar kan penambahan itu dipake untuk parkir, untuk kios untuk pagar, untuk fasilitas penunjang dan kami sudah konsultasi ke kemendagri bidang anggaran selama untuk tidak merubah anggaran inti tidak apa-apa. diluar itu kan bangunan yang tidak terkait langsung dengan induk, tetapi bangunan yang penunjang, apakah boleh? Boleh, sempat terjadi perdebatan di internal, akhirnya kita konsultasi dan boleh.”

Penambahan anggaran yang ada didalam proses pembangunan stadion untuk perbaikan serta pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang yang ada disekitaran stadion. Dimana anggaran 40 miliar menurut DPRD menjadi anggaran yang nantinya menjadi penguat infrastruktur inti bukan untuk pembangunan stadion inti. Penambahan fasilitas seperti lokasi parkir, pembangunan kios, serta fasilitas penunjang lainnya. Hal ini sudah dikonsultasikan kepada Kementrian dalam Negeri mengenai penambahan anggarab, dan diperbolehkan asal bukan untuk pembangunan stadion inti.

Penambahan anggaran sempat menjadi masalah di Internal DPRD mengingat anggaran yang sudah dikeluarkan cukup besar. selain penambahan anggaran yang ada, pada saat perumusan dulu juga menjadi perdebatan mengenai penting atau tidaknya pembangunan stadion. Dimana keputusan pembangunan stadion yang disetujui oleh DPRD harus melalui proses voting, dimana akhirnya lebih banyak anggota yang lebih

memilih untuk meyetujui pembangunan tersebut. Pembangunan sendiri di setuju dengan penganggaran yang bersifat multiyears, hal ini disebutkan dalam MoU (nota kesepakatan bersama) mengenai pembangunan stadion.



Gambar III.V Nota kesepakatan bersama

Dimana didalam pembangunan stadion disebutkan penganggaran yang disetujui tahun 2011 ini akan menjadi proyek multi years yang penganggarnya mulai tahun 2012 dengan penganggaran 50 miliar, kemudian anggaran 2013-2015 mendapatkan anggaran sebesar 60 miliar. Hal ini sesuai dengan nota kesepakatan bersama yang ada.

Peran yang dilakukan oleh DPRD dalam pembangunan stadion bukit lengis ini cukup krusial, dimana selain menjadi penyetuju adanya pembangunan, DPRD juga memiliki fungsi sebagai pengawas serta penyusun anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan stadion, hal ini diungkapkan oleh wakil ketua DPRD, Informan 6 yang mengatakan:

“perencanaan anggaran dan proses pengawasan pelaksanaan, jadi ketika anggaran itu kemudian diajukan lah kita kan mengevaluasi anggaran itu setelah adanya kesepakatan dalam bentuk ini penting apa tidak? Jadi anggaran kita evaluasi. Kemudian dalam proses kita ada kroscek kelengkapan terus mungkin dalam tahun 2015 ini kita sudah dua kali kroscek yang diakomodir oleh komisi yang menangani itu, komisi C.”

Untuk masalah terjadinya pro-kontra dalam hal pembangunan stadion, pihak DPRD kurang memperhatikan adanya permasalahan tersebut, hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Informan 6 yang mengungkapkan:

“selama ini kan tidak ada secara langsung berhadapan dengan DPR kecuali sekali dalam penyusunan Anggaran. Kita udah penyusunan anggaran sudah diatasi kemudian dipertemukan kepentingan ini ini ini sampai sejauh ini secara formal ada gerakan menghadap DPR lagi belum ada, bagaimana kemudian nanti terjadi masalah, antara pro-kontra terhadap yang kontra ini kontra dalam hal apa? kontra dibidang kepentingannya atau kontra dibidang dampak, setiap kepentingan sudah selesai dalam pihak pembicaraan. Kalau ngomongin dampak kita kan tunggu selesai dulu baru. reaksinya seperti apa kemudian penyelesaiannya seperti apa. feeling saya dampak yang paling besar yaitu soal lalu lintas. Kalau dampak yang bersifat parsial, contoh dampak disekitar masyarakat yang memiliki lahan disekitar situ . yang kena dampak, kalau dampak yang terjadi dalam kesalahan pembangunan itu, ya pemerintah harus bertanggung jawab. Contoh dengan adanya pembangunan itu ada yang longsor rusak, pemerintah harus

bertanggung jawab itu. Ya kita ndak mungkin pembangunan yang dibiayai oleh daerah kemudian merugikan hak-hak pribadi masyarakat kan gak mungkin.”

DPRD lebih melihat dampak yang akan menjadi permasalahan nanti yang akhirnya menjadi permasalahan cukup serius, mengingat lokasi yang merupakan lokasi perbatasan antara Surabaya dan Gresik, kemudian kedewasaan supporter yang ada di Indonesia. Serta mengingat kawasan di desa Segoromadu memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi.

III.IV.II Eksekutif

Sebuah pemerintahan pasti memiliki prioritas dalam sebuah rencana untuk perkembangan sebuah daerah. Dalam pelaksanaan perencanaan yang ada, pasti dilakukan atas koordinasi baik perencanaan sampai pelaksanaan yang ada. Dalam pembangunan megaproyek stadion ini memiliki beberapa dinas yang harus turut serta dalam pembahasan serta pengelolaan stadion nantinya. Mulai dari Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan sebagai penyusun rencana pembangunan daerah, Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana pembangunan, serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga sebagai pengelola.

Disbudparpora yang nantinya menjadi pengelola menganggap pembangunan ini merupakan suatu hal yang perlu dilakukan, melalui wawancara bersama Informan 5 selaku kepala dinas budaparpora yang mengatakan:

“ya semua lo, pasti berkepentingan contohnya pertama adalah, pemerintah dengan mempunyai fasilitas ini olahraga diharapkan naik, yang kedua pelaku olahraga sendiri itu terbantuan, yang berikutnya indonesia umumnya khususnya jawa timur, khususnya lagi kabupaten Gresik. Memiliki stadion yang representative untuk pelaksanaan-pelaksanaan pertandingan. Jadi saya pikir semua memiliki kepentingan”

Serta mengungkapkan nantinya bisa menjadi side effect yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Gresik. Selain itu diperkuat oleh wawancara bersama kasubid wilayah Bappeda, informan 4 yang mengatakan:

“ada dua, teknokratis, dan partisipatoris juga ada ini juga dari atas juga dari bawah. Jadi, dari mereka juga bisa, dari eksekutif juga bisa, kemudian influence dari dewan juga bisa, karena mereka juga kan merupakan kepanjangan tangan dari rakyat. Ketika mereka melakukan reses, itu kemudian mereka menampung aspirasi masyarakat yang melalui dewan akhirnya bisa dilakukan. Tapi kalo stadion ini lebih ke arah teknokratis”

Ini menjadi bukti bahwa pembangunan stadion merupakan lebih kepentingan dari pemerintah untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di kabupaten Gresik. Ide yang datang dari kepala pemerintahan daerah menjadi dasar bahwa pembangunan ini lebih ke arah top-down dimana kebijakan berawal dari atas yang nantinya dapat dirasakan baik dampak maupun manfaatnya oleh masyarakat kabupaten Gresik.

Dalam sebuah kebijakan pasti ada hambatan dalam pelaksanaannya, dimana stadion ini merupakan proyek yang dapat dikatakan proyek kelas kakap, mengingat anggaran yang dikeluarkan cukup besar, serta terjadi pro dan kontra yang ada dalam pembangunan stadion ini. pertama dari kadisbudparpora, Informan 5 yang mengatakan:

“Alhamdulillah selama ini tidak ada, selama ini PU melakukan pembangunan lancar-lancar saja ya jadi disitu kan katanya ada patung yang cagar budaya, setelah kita teliti bersama itu tidak terbukti. Itu dijelaskan ini ini ini, setelah dijelaskan pemerintah daerah melakukan dialog apa sih, setelah kita tunjukkan lo ini ini ini, yan mereka juga menerima”

Menurut Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga memberikan sanggahan dalam pro-kontra kebijakan pembangunan stadion yang ada, dimana permasalahan lokasi seperti yang sudah dijelaskan menurut versi pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang nantinya mengelola, mengungkapkan bahwa lokasi tersebut tidak ditemukan adanya cagar budaya. Padahal menurut informasi serta data baik secara langsung dari masyarakat maupun internet mengiyakan adanya monument tersebut.

Sedangkan Bappeda yang merupakan perencana pembangunan mengiyakan adanya hambatan dalam pembangunan tersebut, Informan 4 selaku kasubid wilayah bappeda, mengatakan:

“bener, uang yang harus dikeluarkan kan cukup besar, walaupun 270 ya, 230 kan ketambahan lagi, 270 lah ya, eh otomatis sorotan

dari dewan jelas, kemudian dia kan tidak secara langsung, yang menjadi masalah utama dalam pembangunan kan kesehatan, pendidikan, kayak gitu secara langsung. Tapi kan kita berusaha meyakinkan dewan adanya ini porsi mereka tidak akan berubah, anggaran pendidikan jalan, terus pengentasan kemiskinan tetp juga concern, ini juga tidak mengganggu. Makanya pake multi years, kan Cuma berapa 60, 60, 60 kalo gak salah kan ya. Aku agak gak hafal untuk masalah dana.”

Pembangunan stadion yang memang masalah anggaran yang menjadi concern baik masyarakat maupun DPRD, membuat pembangunan dilakukan selama multi years. Jadi, penganggaran untuk pembangunan stadion diperlukan anggaran dana yang bisa dikatakan cukup realistis dan mengakali pembangunan dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan nota kesepakatan yang ada.

Kebijakan pembangunan stadion yang ada didalam rencana pembangunan daerah memiliki masalah yaitu pro-kontra masyarakat dalam kebijakan pembangunan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait yang masuk dalam pembangunan stadion dengan adanya kontroversi pembangunan tersebut seperti apa?. berikut wawancara bersama bappeda, Informan 4 selaku kasubid wilayah, mengungkapkan:

“kalo bappeda sih secara kewenangan dan secara peran kita tidak secara frontal menghadapi itu. Kami ada dibelakangnya pak bupati. Kita kan support, pendekatan-pendekatan yang dilakukan pendekatan secara ini ke dewan, dan kita kan karena mereka kan concernnya ke keuangan. Kita save dan kita memang bisa meningkatkan PAD lah dan akhirnya keuangan daerah tidak akan mengalami hambatan nah itu. Tetapi kita terus terjun langsung untuk meyakinkan bukan porsi kita untuk melakukan itu. Kita cukup meramu apa sih yang diinginkan pak bupati dalam visi misi

yang dirangkum dalam RPJM. Kita tuangkan dalam situ terus apa aja sih yang dibuthkan oleh skpd kita selaraskan”

Bappeda sendiri mengungkapkan mereka berada di belakang bupati sebagai kepala daerah. Mereka lebih mengungkapkan perannya untuk memberikan penjelasan ke DPRD, mengingat pandangan DPRD mengenai keuangan yang ada. Mereka hanya menjadi peramu keinginan bupati yang nantinya tercantum dalam RPJMD. Selain itu impact yang nantinya ingin dibuat oleh bappeda sebagai peramu, yaitu side effect yang ingin dihasilkan, Informan 4 mengungkapkan:

“hahaha, selama itu bisa menaikkan PAD itu kan kita investasinya kan investasi bukan investasi yang gak jelas begitu ya , jadi kalau seumapa itu dapat dikelola dengan baik mungkin bisa menjadi salah satu wisata jadi kalau sudah masuk ajang internasionalkan saya rasa semua orang pasti kesini. Kita bisa mendompleng kemana saja, kita bisa tarik ke bawean. sebenarnya formulasinya ke arah situ multi efectnya juga banyak karena kita juga nantinya ingin daya saing pariwisata kita belum tersentuh, dalam artian kita mulai gali tapi promotenya kurang. Mereka gatahu bahwa oh disini tuh ada hal yang menarik. Gitu lo, bawean itu kan balinya jawa timur. Terus wisata-wisata religi itu juga perlu ditingkatkan lagi. Packaging nya gitu, mungkin bisa kontribusi lewat CSR, jadi apa ya ya memang suatu masalah kan bisa dilihat secara positif dan negative kan, tergantung cara pandang, memang secara langsung kan tidak kedirect langsung. Impactnya ga ada, sorry kurang. Jadi keberhasilan seorang kepala daerah itu biasanya kadang-kadang dilihat dari keberhasilan pembangunan. Jangankan pak bupati, kepala desa aja kalo mebuat jalan, gapura padahal gak penting, coba sih diuangkan kadang pendapat orang tergantung apa yang dilihat secara visual, eh jamanya bapak itu lo ada ini ini, oh Cuma kalo sekedar santunan mungkin itulah juga harus dipikirkan.”

Menurut Bappeda dalam hal ini diwakili oleh kasubid wilayahnya, mengharapkan pembangunan stadion ini tidak dianggap sebagai proyek mercusuar

yang berlebihan, bappeda menginginkan nantinya pembangunan stadion ini menjadi penambah PAD serta wisata yang dapat terangkat akibat pembangunan stadion ini. namun ada hal yang menarik, yaitu anggapan bahwa sebuah keberhasilan kepala daerah itu biasanya dilihat dari pembangunan yang dilakukan. Perkembangan apa saja yang dilakukan oleh seorang kepala daerah dalam hal ini bupati, untuk membuktikan pembangunan yang dilakukannya berhasil.

Dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) dimana hal ini diperkuat dengan wawancara dari kasubid prasarana wilayah, Informan 4 yang mengatakan:

“itu tidak bisa dikatakan sebagai inisiatif pak bupati, akhirnya dianggap sebagai kebutuhan masyarakat. Emang tertuang dalam visi misi semua, jadi perumusan kebijakan itu bersama SKPD-SKPD terkait, nah ini kan kalo perumusan kebijakan itu kan, bappeda intinya, kita kan sebagai perencana, dalam RPJMD itu. iya, kan musrenbang, ketika ngomong musrenbang seluruh elemen masyarakat di undang jadi semua lsm, perguruan tinggi, terus instansi-instansi terkait jelas, level bawah sampai atas, itu kan pertemuan usulan dari bottom up dan top down. Nah beberapa tahun ini kita mencoba melakukan musrenbang dalam level e-renbang sistemnya by online. Sehingga semuanya kan bisa kelihatan. Jadi tidak ada kebijakan siluman yang lagi ini ahok itu kan kita mulai lakukan itu kita laksanakan. E-budgeting juga sudah Walau masih terjungkak-jungkak ya. Proses, kan menuju ke lebih baik.

Dan diperkuat oleh kepala dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga. Bahwa perumusan kebijakan itu didasari atas kerjasama seluruh pihak dalam perumusannya, dimana Informan 5 mengatakan:

“ya tentunya lembaga-lembaga terkait, eh dewan juga, ada eksekutif ada legislative dikumpulkan jadi satu, selain itu mengundang seluruh elemen masyarakat yang terkait. kalo kita belum membangun sebuah prasarana olahraga.”

Ini sesuai dengan adanya argumentasi dari kawan-kawan pro bahwa mendapatkan wadah untuk menyampaikan aspirasi bagi sebuah kelompok kepentingan yang ingin ikut serta dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan. Dalam sistem politik yang demokratis seluruh masyarakat di berikan ruang untuk terlibat langsung tanpa memandang status yang diemban baik pendidikan yang tinggi, pengusaha, atau masyarakat biasa memiliki hak yang sama dalam memberikan pandangan terkait suatu kebijakan.

Dinas PU sebagai pelaksana untuk mengurus pembangunan stadion mengungkapkan mereka hanya sebagai eksekutor pembangunan. Sedangkan yang lain-lain diurus oleh bappeda. Pembangunan stadion ini sendiri dilakukan dengan tiga tahap yaitu: perencanaan, pembangunan, dan perawatan. Yang ketiga tahap itu dilaksanakan oleh pihak-pihak swasta yang memenangi tender. Berbeda dengan keterangan DPRD, dinas PU dan Bappeda mengatakan bahwa tambahan 40 miliar itu dalam tahap proses lobbying untuk mendapatkan bantuan dari APBN.

III.V. Analisa Teoritik

Kebijakan pembangunan Stadion yang dilakukan didesa Segoromadu, kabupaten Gresik. Dimana pembangunan Stadion masih dalam Proses pembangunan ini menjadi permasalahan, bagaimana di tingkat masyarakat terjadi dua hal baik dukungan serta penolakan mengenai kebijakan ini. selain itu perbedaan pandangan antar pemerintah baik eksekutif dan legislative mengenai penambahan anggaran yang dilakukan.

Kontestasi yang terjadi antar kelompok kepentingan yang ada baik Pro dan Kontra terkait dengan kebijakan pembangunan tersebut. Dapat dianalisis menggunakan Teori Pluralisme. Pluralisme adalah sistem yang memungkinkan semua kepentingan dalam masyarakat bersaing secara bebas untuk mempengaruhi proses politik yang bertujuan untuk mencegah adanya suatu kelompok mendominasi kelompok lain. karakteristik pluralisme merupakan suatu sistem perwakilan kepentingan.

Dasar untuk semua pendukung pluralisme adalah gagasan bahwa keragaman adalah suatu komoditas sosial untuk mencegah dominasi satu ide tertentu. Kekuatan harus menyebar dan tidak boleh menumpuk di Negara. Pluralisme adalah proposisi bahwa fakta keanekaragaman harus diakui memiliki signifikansi etikopolitik

fundamental³⁰. Dalam masyarakat liberal ada kelompok yang harus diperhatikan dalam pembuatan keputusan. Kelompok dapat dianggap sebagai alternatif untuk mengorganisir kepentingan individu.

Pluralis berakar pada tradisi konflik yang memandang publik sebagai konfigurasi dari berbagai kelompok kepentingan (*interest groups*). Setiap orang yang mempunyai kepentingan yang sama akan bergabung dan membentuk sebuah kelompok kepentingan. Selanjutnya, kelompok-kelompok kepentingan tersebut berinteraksi dan berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan individu-individu maupun organisasi yang mereka wakili.

Berdasarkan sistem politik Gabriel Almond dijelaskan bahwa dalam sebuah sistem politik yang terdiri dari berbagai struktur dan fungsi ini memiliki kaitan erat dengan penelitian mengenai kontestasi kelompok masyarakat terhadap kebijakan publik. Kelompok kepentingan memiliki kekuatan dalam mempengaruhi arah serta kebijakan yang akan diambil. Dimana kelompok masyarakat yang terorganisasi ini berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak untuk masuk maupun memperoleh jabatan public.

Kelompok kepentingan dalam struktur dan fungsi dari sistem politik Gabriel Almond ini berfungsi sebagai sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi

³⁰ Agistino, Fred D. handbook teori politik: "pluralism dan liberalism".

politik, maksudnya menjadi sosialisasi untuk masyarakat agar mengetahui agenda maupun kebijakan yang akan dirumuskan, rekrutmen dalam hal ini dapat dikatakan menjadi wadah bagi masyarakat yang pro dan kontra untuk terhubung dalam kelompok kepentingan yang dapat mengetahui secara gambalang proses kebijakan tersebut. Kelompok kepentingan menjadi input bagi arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan.

Dalam konteks formulasi kebijakan dimana para kelompok kepentingan berusaha untuk memenuhi tuntutan mereka melalui “lobby”, maka Greenwald (1977) menjelaskan adanya berbagai teknik lobby baik langsung (mempresentasikan pendapat atau fakta secara langsung kepada perumus kebijakan, berpartisipasi dalam bill drafting, pengujian pendengaran) maupun tidak langsung (tindakan konstituen, anggota kelompok kepentingan memperbesar dampaknya terhadap “grass-root” melakukan lobi dengan sejumlah anggota besar yang ada di dalamnya, teknik-teknik pengawasan situasi tertentu yaitu dengan mendramatisir berbagai isu yang ada, mengkampanyekan isu public melalui periklanan, dan protes).³¹

Dalam sebuah pemerintahan yang demokrasi, kelompok dan organisasi yang independen membantu mencegah terjadinya dominasi dan menciptakan pengawasan timbal-balik. Kehadiran organisasi maupun kelompok-kelompok kepentingan

³¹ Muhlis madani.2011. *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. graha ilmu, Yogyakarta.

diharapkan menjadi solusi apabila terjadi bentuk kesewenangan dalam sebuah kekuasaan. Teori pluralism memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan serta ikut serta dalam proses perumusan kebijakan tanpa perlu takut adanya intervensi dari pihak lain.

Di dalam pluralis itu harus diberikan melalui menggambarkan 'siapa' yang terlibat dan 'bagaimana' mereka terlibat dalam pembuatan 'keputusan penting'. Nelson Polsby dalam "kekuatan masyarakat dan teori politik" (1980) yang ditentukan kemudian tiga pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh 'indeks kekuatan aktor': siapa yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, dan siapa yang menang.

Dalam kontestasi yang terjadi terhadap kebijakan pembangunan stadion ini, partisipasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang merasa memiliki kepentingan dalam kebijakan pembangunan ini. kelompok Pro yang diwakili oleh Ultras yang merupakan supporter fanatik dari Persegres. Sedangkan kelompok Kontra diwakili oleh Pudak, maupun PMII. Mereka melakukan berbagai upaya untuk mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini yang ikut serta dalam pengambilan keputusan adalah kawan-kawan yang pro, dalam hal ini Ultras diundang untuk ikut terlibat langsung dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Namun dalam prakteknya terdapat beberapa hal yang dapat memberikan gambaran mengenai kontestasi tersebut, dimana munculnya kelompok-kelompok baik Pro maupun Kontra ini sifatnya lebih pokoknya ada namun tidak ada effect yang ingin lebih diutarakan, hal ini berkaitan dengan pembagian yang diberikan oleh pemerintah yaitu nantinya basecamp dari Ultras akan mendapatkan jatah didalam Stadion Bukit Lenggis, sedangkan kelompok-kelompok Pro diberikan fasilitas untuk menjadi operator parkir.

Kehadiran organisasi-organisasi yang bebas dan nyata diharapkan menjadi pencegah kesewenangan dalam kekuasaan. Kelompok kepentingan yang ada diharapkan menjadi jembatan ke pemerintah untuk melakukan: Membantu menstabilkan kesenjangan politik, Membantu mengubah kesadaran politik, Penyimpangan Agenda Umum, dan Mengalihkan control terakhir atas agenda. Memberikan gap yang tidak terlalu jauh antara masyarakat dan pemerintah yang berkuasa.

Teori Pluralis juga memiliki beberapa Variasi dalam menggambarkan kondisi masyarakat yang ada. Dimana ada tiga variasi pluralism, yaitu: Stratified, Hyper-Pluralist, dan Neo-pluralist. Dalam kontestasi masyarakat yang terjadi terhadap kebijakan pembangunan ini memiliki kemiripan dengan kondisi masyarakat di New Heaven, Amerika Serikat. Keadaan dalam masyarakat berlayer (terdiri dari beberapa lapis) serta mempunyai kondisi yang sama. Masing-masing strata tersebut terdiri dari

beberapa kelompok kepentingan dan punya kepentingan tertentu yang ingin mereka perjuangkan.

Sistem politik yang mengedepankan pendapat bahwa “Jika pemimpin memimpin, mereka juga dipimpin”. Hal itu mengakibatkan keputusan yang diambil ambigu. Hanya beberapa orang yang punya kuasa langsung namun sisanya tidak memberikan pengaruh langsung. Maka dari itu pluralisme di Gresik hanya berada dalam lingkup pembuat keputusan yang notabene merupakan penduduk aktif, namun tidak membuat mereka berperan sebagai elite tunggal. Maksudnya masyarakat ikut berperan aktif dalam mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Karena pemimpin merupakan pilihan masyarakat, maka pemimpin juga bertanggung jawab atas keinginan masyarakatnya.

Namun sebagai sebuah teori yang menggambarkan mengenai sistem perwakilan kepentingan dinilai memiliki sejumlah kelemahan, yaitu³²:

1. Karena lebih menekankan pada persaingan kelompok kepentingan, maka secara implicit pluralism sesungguhnya membatasi partisipasi individu dalam proses politik. Karena masyarakat harus ikut terkotak-kotakan dalam pilihan untuk ikut secara bebas dalam mempengaruhi kebijakan.

³² Surbakti, Ramlan. Op.cit hal 104

2. Hanya segelintir individu dalam masyarakat yang menjadi anggota aktif dalam asosiasi kepentingan. Jumlah partisipan dalam kelompok masyarakat bisa dikatakan kurang dari lima persen dari total penduduk kabupaten Gresik.
3. Pengaruh pemimpin lebih dominan dalam mengatur dan menentukan arah organisasi daripada anggota kelompok. Pemimpin organisasi memiliki kewenangan dalam memberikan pandangan yang dapat mempengaruhi jalannya alur kepentingan yang akan diperjuangkan oleh kelompok.
4. Terdapat ketimpangan kekuasaan dalam proses perundingan, yakni kelompok yang kuat tetapi memperjuangkan kepentingan yang skalanya kecil lebih dominan daripada kelompok kecil atau lemah yang memperjuangkan kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat luas. Hal ini juga terjadi terhadap kontestasi masyarakat yang terjadi di Kabupaten Gresik, dimana kelompok pro yang mewakili kepentingan pecinta bola lebih dominan ketimbang kelompok kontra yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat luas.
5. Mengabaikan peran pemerintah sebagai lembaga pemerintah sebagai lembaga kepentingan umum, karena pluralism memandang pemerintah sebagai wasit yang memelihara aturan permainan bagi persaingan diantara kelompok kepentingan. Memberikan wadah bagi masing-masing kelompok kepentingan masyarakat yang ada untuk memberikan

pandangan baik dalam proses politiknya melalui cara-cara dan upaya yang dilakukan, pemerintah memberikan wadah untuk masyarakat dapat berekspresi dalam kebijakan pembangunan tersebut.

